

**FAKTOR DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi**



**INTAN REGITA CAHYANI
NIM. 122110011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MA CHUNG
MALANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi :

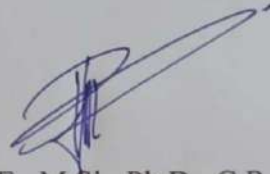
Faktor Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Intan Regita Cahyani
NIM : 122110011
Program Studi : Akuntansi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung, pada tanggal 11 Juli 2025 dan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Strata Satu (S1).

Dosen Pembimbing Utama



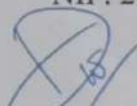
Tarsisius Renald Suganda, S.E., M.Si., Ph.D., C.R.A., CIC.
NIP. 20080021

Dosen Pembimbing Pendamping



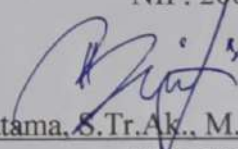
Rino Tam Cahyadi, S.E., M.S.A., CIC.
NIP. 20190012

Dosen Ketua Penguji



Dian Wijayanti, S.E., M.Sc.
NIP. 20090018

Dosen Anggota Penguji



Bagas Brian Pratama, S.Tr.Ak., M.Tr.Ak.
NIP. 20230002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Tarsisius Renald Suganda, S.E., M.Si., Ph.D., C.R.A., CIC.
NIP. 20080021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

“Faktor Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar”

merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan karya plagiat yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi sebagaimana semestinya, baik sebagian maupun seluruhnya. Semua sumber – baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Malang, 14 Juli 2025



Intan Regita Cahyani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Faktor Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga tugas akhir ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

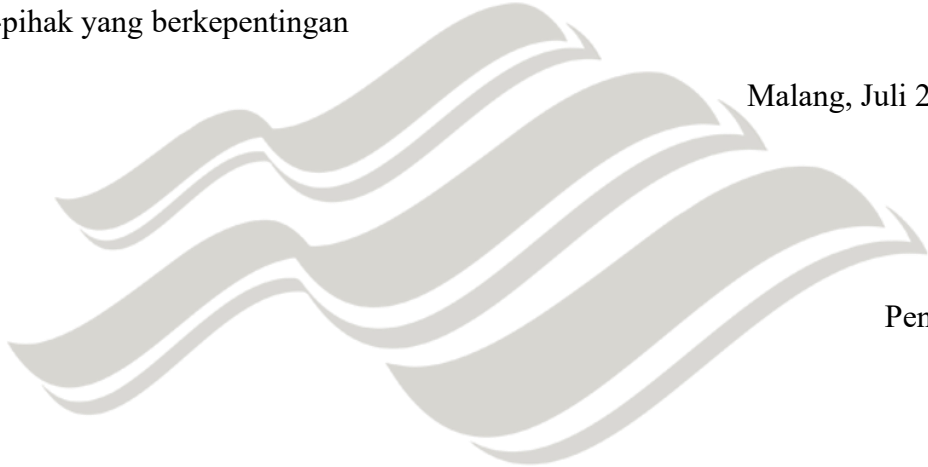
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc., selaku Rektor Universitas Ma Chung
2. Bapak Tarsisius Renald Suganda, S.E., M.Si., Ph.D., CRA. CIC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ma Chung dan Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
3. Bapak Rino Tam Cahyadi, S.E., M.S.A., selaku Kepala Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ma Chung dan Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Daniel Sugama Stephanus, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Ibu Dian Wijayanti, S.E., M.Sc., selaku Dosen Penguji I yang memberi kritik dan saran terhadap penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Bagas Brian Pratama, S.Tr.Ak., M.Tr.Ak., selaku Dosen Penguji II yang memberi kritik dan saran terhadap penulisan tugas akhir ini.

7. Orang tua, saudara, dan teman-teman seperjuangan di Program Studi Akuntansi atas doa, bimbingan, dukungan, kerja sama, serta kasih sayang yang selalu tercurah.

Penulis menyadari tugas akhir ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga akhirnya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan

Malang, Juli 2025

Penulis



UNIVERSITAS
MA CHUNG

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Ma Chung, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Regita Cahyani

NIM : 122110011

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Universitas Ma Chung atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Faktor Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Ma Chung berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Di buat di : Malang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Yang menyatakan,



Intan Regita Cahyani

ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan adalah salah satu isu penting yang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena merupakan ukuran utama yang menunjukkan pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari 68 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105, yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK-SKPD), Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar. penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Government Governance* (GGG), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan, Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini disebabkan oleh penerapan Sistem Pengendalian Internal yang tidak optimal dan belum diimbangi dengan budaya organisasi yang baik seperti integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah perlu secara aktif meningkatkan kompetensi SDM, mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, menerapkan PSAP dalam pelaporan keuangan, serta memperkuat dan mengevaluasi SPI secara berkala.

Kata-kata kunci: kualitas laporan keuangan, *good government governance*, sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, sumber daya manusia

ABSTRACT

The quality of financial statements is one of the important issues of concern to the local government because it is the main measure that shows the accountability of the Head of the Region for the duties and authorities that have been delegated. This study aims to determine the effect of good government governance, internal control system, implementation of government accounting standards, and competence of human resources on the quality of local government financial reports. The data used in this study are primary data from 68 Regional Work Units in Blitar City. The number of respondents used in this study were 105, consisting of the Regional Financial Administration Officer (PPK-SKPD), the Treasurer of the Regional Work Unit (SKPD), and the Accounting and Reporting Section of the Regional Revenue, Finance and Assets Office (BPKAD) of Blitar City. This research used a questionnaire with a Likert scale of 1-4. The results of this study indicate that good government governance (GGG), the implementation of government accounting standards (GAS), and the competence of human resource (HR) have a positive effect on the quality of local government financial reports (LGFR). Meanwhile, the internal control system (ICS) has no effect on the quality of local government financial reports (LGFR). This is due to the application of the internal control system that is not optimal and has not been balanced with a good organizational culture such as integrity and accountability. Thus, local governments need to actively enhance human resource competencies, uphold the principles of good governance, implement Government Accounting Standards (GAS) in financial reporting, and strengthen and regularly evaluate the Internal Control System (ICS).

Keywords: quality of financial reports, good government governance, internal control system, government accounting standards, human resource

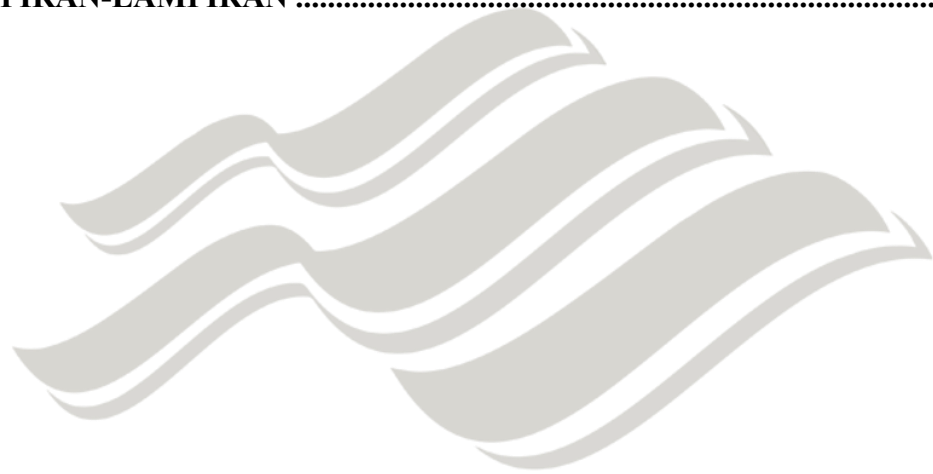
DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 <i>Stewardship Theory</i>	10
2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
2.3 <i>Good Government Governance</i>	14
2.4 Sistem Pengendalian Internal.....	17
2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	18
2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	19

2.7	Penelitian Terdahulu	20
2.8	Urgensi Penelitian.....	23
2.9	Hipotesis Penelitian	25
2.9.1	Pengaruh <i>Good Government Governance</i> terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.9.2	Pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26
2.9.3	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
2.9.4	Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.10	Rerangka Teoretis	29
2.11	Desain Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Jenis dan Sumber Data	31
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
3.4	Teknik Pengambilan Data.....	32
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	33
3.5.1	Variabel Dependen.....	33
3.5.2	Variabel Independen	34
3.6	Instrumen Penelitian	35
3.7	Metode Analisis Data	37
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	37
3.7.2	Uji <i>Outer Model</i>	38
3.7.3	Uji Multikolinearitas.....	39

3.7.4	Uji <i>Inner Model</i>	39
3.7.5	Uji Hipotesis	39
3.8	Hipotesis Statistik	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Data Penelitian	41
4.1.1	Gambaran Umum Responden	41
4.1.2	Deskripsi Responden	44
4.2	Statistik Deskriptif	45
4.3	Uji Outer Model	46
4.3.1	Uji <i>Convergent Validity</i>	46
4.3.2	Average Variance Extraced (AVE)	48
4.3.3	Uji Reliabilitas	49
4.4	Uji Multikolinearitas	50
4.5	Uji Koefisien Determinasi (R Square)	50
4.6	Uji Hipotesis	51
4.7	Pembahasan	52
4.7.1	<i>Good Government Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	52
4.7.2	Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	54
4.7.3	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	55
4.7.4	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	56
4.8	Impikasi Penelitian	57
4.8.1	Implikasi Teoretis	57

4.8.2	Implikasi Praktis	59
BAB V PENUTUP.....		61
5.1	Simpulan.....	61
5.2	Keterbatasan Penelitian	63
5.3	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN-LAMPIRAN		74



UNIVERSITAS
MA CHUNG

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Dependen	33
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Independen.....	34
Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Kuesioner	36
Tabel 5. Skor Skala 4- <i>Likert</i>	37
Tabel 6. Rincian Jumlah Sampel.....	41
Tabel 7. Data Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	42
Tabel 8. Data Distribusi Kuesioner	42
Tabel 9. Karakteristik Responden	44
Tabel 10. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	45
Tabel 17. Hasil Uji <i>Convergent Validity</i>	46
Tabel 18. <i>Average Variance Extraced</i> (AVE).....	48
Tabel 19. Uji Reliabilitas <i>Outer Model</i>	49
Tabel 20. Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 21. Hasil Uji <i>R-Square</i>	50
Tabel 22. Hasil Uji Hipotesis GGG, SPI, PSAP, SDM terhadap Kualitas LKPD	51

DAFTAR BAGAN

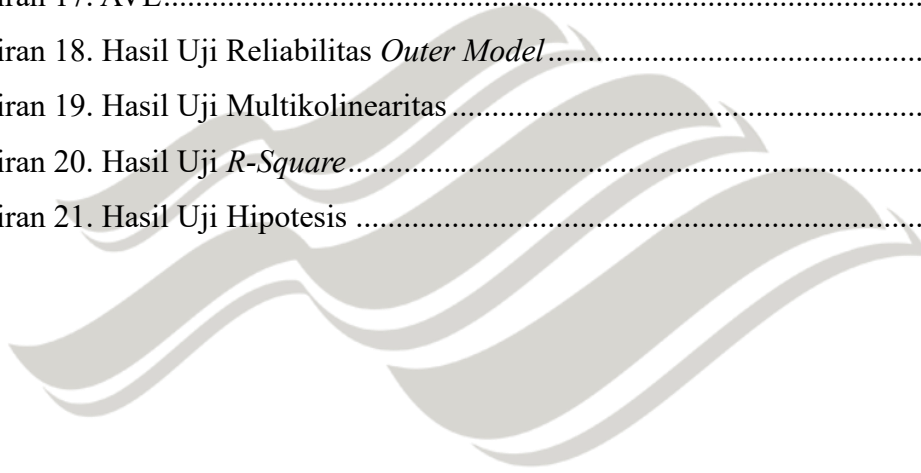
Bagan 1. Rerangka Teoritis	29
Bagan 2. Desain Penelitian	29



UNIVERSITAS
MA CHUNG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	74
Lampiran 2. Sampel Penelitian	81
Lampiran 4. Tabulasi Data Responden Penelitian	83
Lampiran 15. Statistik Deskriptif.....	95
Lampiran 16. Hasil Uji <i>Convergent Validity</i>	95
Lampiran 17. AVE.....	96
Lampiran 18. Hasil Uji Reliabilitas <i>Outer Model</i>	97
Lampiran 19. Hasil Uji Multikolinearitas	97
Lampiran 20. Hasil Uji <i>R-Square</i>	97
Lampiran 21. Hasil Uji Hipotesis	97



UNIVERSITAS
MA CHUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian lebih bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut mencerminkan tingkat akuntabilitas Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan serta dalam mengelola organisasi secara transparan dan bertanggung jawab (Fitriani *et al.*, 2024). Informasi keuangan yang berkualitas akan membantu masyarakat dan pihak berkepentingan yang bertindak sebagai pengguna laporan keuangan dalam meminimalisir ketidakpastian dan meningkatkan pengetahuan pada fokus tertentu (Bawono *et al.*, 2021). Informasi ini juga dapat membantu kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berhubungan dengan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara transparan.

Tuntutan masyarakat mengenai penyajian laporan keuangan daerah yang berkualitas menjadi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). *Good Government Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pola sikap dan tindakan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan karakteristik dasar *good governance* pada sektor publik (Azzindani & M. Irwan, 2020). Terwujudnya *Good Government Governance* adalah suatu bentuk keberhasilan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membantu

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab atas wewenang dan kepercayaan publik yang telah diberikan (Nirwana & Darmawaty, 2023). Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, Pemerintah Daerah harus mencermati karakteristik-karakteristik yang menjadi standar kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat beberapa karakteristik kualitatif yang menjadi skala normatif pada penyajian laporan keuangan, yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ketetapan ini menuntut agar laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji atau materialitas, objektif, serta dapat diverifikasi (Sarwono & Munari, 2022). Menurut Asdi & Munari (2023), laporan keuangan yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini karena Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan dasar pokok dan pedoman akuntansi yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah no. 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan keandalan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset serta pelayanan publik (Haryanto, 2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitatif dapat merepresentasikan kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Kualitas LKPD juga dapat direpresentasikan melalui dampak peninjauan yang dituangkan dalam bentuk opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu opini yang diberikan oleh BPK adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang telah diperiksa menyajikan informasi secara wajar dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas (BPK, 2020). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI (2024) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2024, jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat disebut dengan LKPD tahun 2023 yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Penurunan yang terjadi sebesar 1,2 %, yaitu tahun 2022 sebanyak 496 dari 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini WTP, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 493 dari 546 LKPD yang memperoleh opini WTP. Di sisi lain, hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 16 LKPD. Kenaikan dan penurunan yang terjadi pada opini LKPD tentunya disebabkan oleh beberapa faktor atau aspek yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.

Satu diantara aspek penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal. Hasil pemeriksaan BPK pada laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I tahun 2024 mengungkapkan bahwa terdapat 8.078 temuan yang memuat 5.426 permasalahan kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal. Permasalahan kelemahan SPI ini meliputi 29 % permasalahan kelemahan sistem pengendalian

akuntansi dan pelaporan, 54 % permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 17 % permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2024). Sistem Pengendalian Internal berperan penting dalam peningkatan kinerja, tanggung jawab, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara guna terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas (Ibrahim *et al.*, 2024). Selain itu, penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (4) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak sebagai pengguna anggaran harus memastikan bahwa pengelolaan APBD serta akuntansi keuangan telah dilakukan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Untuk menerapkan SAP serta SPI yang efektif, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi pemerintah serta operasional pemerintahan (Indrayani & Widiastuti, 2020). Kualitas Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu aspek penting dalam penentuan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia akan mendukung kualitas dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Nilamsari *et al.*, 2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia itu sendiri merupakan kapasitas atau kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau suatu sistem yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan secara

efektif dan efisien (Aprsiansyah *et al.*, 2020). Penyusunan, penyajian dan pelaporan keuangan oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten serta memahami secara mendalam tentang akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor determinan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Haryanto, 2023) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qomah & Ismunawan (2021) dan Maydiyanti *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumaryati *et al.*, (2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lain mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia juga telah dilakukan oleh Bawono *et al.*, (2021) dan Haryanto (2023) yang menghasilkan pernyataan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Qomah & Ismunawan (2021) dan Maydiyanti *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, penelitian mengenai *Good Government Governance* juga telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana & Darmawaty (2023) menyatakan bahwa *Good Government Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Philadhelpia *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2021) juga menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini adalah adaptasi dari penelitian yang dikemukakan oleh Haryanto (2023), dengan menghilangkan variabel teknologi informasi. Keputusan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2023) ; Maydiyanti *et al.*, (2020; Qomah & Ismunawan (2021), yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kesenjangan hasil penelitian mengenai Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh komponen-komponen tersebut dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, pentingnya *Good Government Governance* dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi dasar peneliti untuk meneliti lebih mendalam pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan IHPS BPK, dalam 10 tahun terakhir (2013-2023) terdapat

ketidakkonsistenan dalam perolehan opini WTP terhadap LKPD pada beberapa Pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih pemerintah Kota Blitar sebagai objek penelitian karena Kota Blitar merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 14 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Hal ini tentunya berhubungan erat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Blitar (Pemerintah Kota Blitar, 2024). Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan opini WTP sebagai wujud dari pelaporan keuangan yang berkualitas

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan serta adanya gap penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Government Governance*, penerapan Sistem Pengendalian Internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *Good Government Governance* (GGG) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Good Government Governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Menganalisis pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas terkait dengan bidang akuntansi, khususnya Akuntansi Sektor Publik.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor determinan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak yang terkait pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor determinan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan penelitian dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai faktor determinan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan paradigma yang berfokus terkait dengan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) yang mendefinisikan sebagai keadaan ketika manajer tidak memiliki kepentingan pribadi melainkan lebih mementingkan kepentingan pemilik. Teori *stewardship* berdasar pada psikologi dan sosiologi yang menjelaskan bahwa manajer sebagai pengelola bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Apabila terdapat ketidakselarasan kepentingan, manajer akan memilih untuk bekerja sama daripada menentang, hal ini karena manajer berpendapat bahwa kepentingan bersama dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik merupakan sebuah pertimbangan yang lebih rasional dalam mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007). Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai manajer yang memiliki fokus utama dalam pengelolaan sumber daya serta masyarakat bertindak sebagai pemilik (Indrayani & Widiastuti, 2020). Pemerintah sebagai manajer memiliki tugas utama melayani publik dan menjamin kesejahteraan masyarakat (Jauhari *et al.*, 2021).

Di antara wujud pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah selaku bentuk akuntabilitas adalah pelaporan keuangan daerah yang berkualitas. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan peningkatan tata kelola yang baik oleh pemerintahan. Tata kelola yang baik mencerminkan pelayanan dan tanggung jawab

pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya yang efektif guna kesejahteraan publik (Nirwana & Darmawaty, 2023). Selain itu, implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pelaporan keuangan daerah juga merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan memuat prinsip-prinsip yang dapat membantu pemerintah dalam penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai dengan kualitas yang dikehendaki (Jauhari *et al.*, 2021). Untuk memastikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang benar, diperlukan Sistem Pengendalian Internal yang baik. Sistem Pengendalian Internal juga merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan guna meminimalisir adanya hambatan atau permasalahan dalam proses pencapaian tujuan organisasi (Gustina, 2021). Selain itu, upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik juga harus didukung dan diperkuat dengan Sumber Daya Manusia yang berperan sebagai komponen utama dalam menjalankan kegiatan yang bersangkutan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Apabila Pemerintah Daerah memiliki komitmen penuh dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Internal, kompetensi Sumber Daya Manusia, serta mempertimbangkan tata kelola pemerintah yang baik, maka meningkatkan kesejahteraan publik dan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Pemerintah Daerah memiliki komitmen penuh dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Internal, kompetensi Sumber Daya Manusia, serta mempertimbangkan tata kelola pemerintah yang baik,

maka hal tersebut akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan publik. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah juga akan semakin tumbuh seiring dengan meningkatnya integritas dan akurasi dalam pelaporan keuangan.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Satu dari wujud transparansi dan manifestasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Sarwono & Munari, 2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna. Menurut Ridzal *et al.*, (2022), laporan keuangan yang berkualitas idealnya adalah laporan keuangan yang merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan yang akurat dan mendekati kebenaran. Sehingga, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan Pemerintah Daerah serta kepentingan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat beberapa karakteristik kualitatif atau ukuran normatif yang perlu direalisasikan agar laporan Pemerintah Daerah dapat menjadi laporan yang berkualitas, antara lain:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dinilai relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna. Informasi tersebut dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi peristiwa di masa yang akan datang. Informasi yang relevan disajikan tepat waktu dan selengkap mungkin, serta mencakup semua informasi akuntansi yang harus dijabarkan dengan jelas.

2. Andal

Laporan keuangan yang andal adalah laporan yang memuat informasi yang merepresentasikan dengan jujur dan wajar atas peristiwa dan transaksi yang terjadi. Informasi yang telah disajikan dapat diuji kebenarannya dan menghasilkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda. Informasi yang andal juga bersifat netral dan tidak berpihak pada pihak atau kebutuhan tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan yang dimiliki oleh entitas lain berdasar pada kebijakan akuntansi yang diterapkan. Hal ini agar laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi pengguna dan pihak yang berkepentingan. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan, perbandingan eksternal dilakukan apabila entitas lain selaku objek perbandingan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dijelaskan dengan bahasa dan istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna. Dalam hal ini, pengguna atau pihak yang berkepentingan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi yang telah disajikan.

Jadi, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan keuangan yang memenuhi empat karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga mencapai standar kualitas yang diharapkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas merepresentasikan kualitas dari pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini, dapat memengaruhi tuntutan dan kepercayaan publik serta membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan kendala yang mungkin terjadi.

2.3 *Good Government Governance*

Good Government Governance (GGG) biasa disebut dengan manajemen pemerintah yang optimal ialah sebuah struktur atau pedoman dalam pengambilan keputusan dan perilaku pada pemerintahan dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi dengan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan (Kewo & Tanor, 2020). Terwujudnya tata kelola yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan daerah. Pengelolaan yang menjadi perhatian publik ini mengarah kepada pengelolaan keuangan dan

laporan keuangan yang disajikan. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab atas wewenang dan kepercayaan publik yang telah diberikan (Nirwana & Darmawaty, 2023).

United Nation Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa terdapat sembilan prinsip *Good Government Governance* yang harus menjadi pedoman dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut (Inayati *et al.*, 2024).

- a. Partisipasi, mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan untuk berasosiasi, mengemukakan pendapat, dan berkontribusi secara konstruktif.
- b. Supremasi hukum, setiap individu dan lembaga diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi di hadapan hukum. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan dan kepatuhan publik terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Transparansi, transparansi didasarkan pada kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh serta mengakses informasi mengenai kepentingan publik.
- d. Daya tanggap, dalam hal pelayanan publik, organisasi pemerintahan harus responsif dan sejalan dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat atau pihak yang berkaitan.

- e. *Consensus Orientation*, Pemerintah harus menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan mencari kesepakatan terbaik untuk masing-masing pihak.
- f. Keadilan, setiap individu dalam masyarakat memiliki hak yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan.
- g. Efektivitas dan Efisiensi, berdaya guna (efisien) dan berhasil mencapai tujuan (efektif) dalam pengelolaan sumber daya.
- h. Akuntabilitas, pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik atas setiap program, kegiatan, tindakan, serta kebijakan yang telah dilaksanakan.
- i. Visi Strategis, Pemerintah bersama masyarakat harus memiliki rencana, pandangan, dan tujuan berkelanjutan di masa mendatang yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Namun, UNDP menyatakan bahwa dari kesembilan prinsip *Good Government Governance* terdapat empat prinsip utama yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum (Kompas.com, 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tata kelola pemerintahan merupakan pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan publik yang memiliki sembilan komponen penting dan empat prinsip utama yang harus direalisasikan. Tata kelola pemerintah yang semakin baik merepresentasikan peningkatan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah tahapan yang melibatkan tindakan yang secara terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, yang meliputi keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki beberapa unsur yang menjadi satu kesatuan dan bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah, yaitu sebagai berikut.

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian internal

Sistem Pengendalian Internal berperan penting dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, entitas memiliki keharusan untuk melakukan pengendalian internal atas pengelolaan kegiatan pemerintahan. Pengendalian internal diperlukan dalam mengidentifikasi dan menganalisis terkait permasalahan yang ada atau mungkin dapat terjadi, sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Gustina, 2021).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang baik dalam pemerintahan mencerminkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan dapat diandalkan.

2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 3, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dasar akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga memiliki peran penting atas keandalan dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan berperan sebagai ketentuan mutlak yang menjadi acuan dan pedoman utama Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan peningkatan kualitas (Philadhelpia *et al.*, 2020). Laporan keuangan yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kebenarannya (Asdi & Munari, 2023).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dasar dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi acuan dalam mengukur kualitas laporan keuangan, karena jika suatu entitas menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintahan dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas tersebut.

2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pergantian peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentunya membawa perubahan besar dan signifikan dalam manajemen keuangan pemerintah. Perubahan ini meliputi perubahan ruang lingkup dan basis akuntansi serta komponen-komponen dalam laporan keuangan (Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2022). Perubahan peraturan SAP menuntut adaptasi yang lebih besar dari Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab dalam penyusunan, penyajian, dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang terkait. Kompetensi Sumber Daya Manusia itu sendiri merupakan kapasitas atau kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau suatu sistem yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Aprsiansyah *et al.*, 2020). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dapat membantu Pemerintah Daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan hal penting yang mendukung perwujudan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sumber Daya Manusia harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk

memahami sistem dan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk itu, kompetensi Sumber Daya Manusia yang semakin baik akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maydiyanti <i>et al.</i> , (2020)	Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Metode Penelitian: Kuantitatif (data primer)	1. SAP, SAKD, dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 2. Teknologi informasi dan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.
2	Sumaryati <i>et al.</i> , (2020)	Variabel Independen: Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, kompetensi Sumber Daya Manusia. Variabel Dependen: Kualitas Laporan	1. Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. SIA dan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(dilanjutkan.....)

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Keuangan Pemerintah Daerah Metode Penelitian : Kuantitatif (data primer)	
3	Philadhelpia <i>et al.</i> , (2020)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode Penelitian: Kuantitatif (data primer)	1. Standar Akuntansi Pemerintahan dan <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.
4	Qomah & Ismunawan (2021)	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Metode Penelitian: Kuantitatif (data primer)	1. Penerapan SAP dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 2. Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.
5	Bawono <i>et al.</i> , (2021)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi,	Kompetensi Sumber Daya Manusia, SIA, dan SPI berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD.

(dilanjutkan.....)

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Sistem Pengendalian Internal. Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode Penelitian: Kuantitatif (data primer)	
6	Maulana (2021)	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, <i>Good Governance</i> Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Metode Penelitian: Kuantitatif (data primer)	SAP, SPI, dan <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD
7	Nirwana & Darmawaty (2023)	Variabel Independen: <i>Good governance</i> Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Metode Penelitian: Kuantitatif (data primer)	<i>Good governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
8	Haryanto (2023)	Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia.	1. SAP, SPI, dan SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. 2. Teknologi informasi tidak berpengaruh

(dilanjutkan.....)

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Metode Penelitian: Kuantitatif (data primer)	terhadap kualitas LKPD.

Sumber: Data diolah (2024)

2.8 Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena adanya tuntutan masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas. Masyarakat mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Berdasarkan IHPS BPK dalam 10 tahun terakhir (2013-2023), terdapat ketidakkonsistenan dalam perolehan opini WTP terhadap LKPD pada beberapa Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini WTP adalah indikator bahwa laporan keuangan telah disusun dengan baik, transparan, akuntabel, serta telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, mempertahankan opini WTP sangat penting untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah memenuhi standar pelaporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan opini WTP sebagai perwujudan pelaporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam perolehan opini WTP, sehingga dapat dilakukan penanganan dan pengambilan keputusan yang tepat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan berdampak positif pada transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Haryanto (2023) yang menggunakan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah sebagai variabel dependen dengan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi Sumber Daya Manusia, serta Teknologi Informasi sebagai variabel independen pada SKPD di Kota Semarang. Kontribusi penelitian ini adalah penambahan variabel independen *Good Government Governance* yang berdasar pada penelitian Nirwana & Darmawaty (2023). *Good Government Governance* mencerminkan pelayanan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya yang efektif untuk terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan kesejahteraan publik.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang sama dengan terdahulu, yaitu kota yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya dengan perbedaan daerah penelitian, yaitu Kota Blitar. Kota Blitar dipilih sebagai objek penelitian karena

merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 14 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2023.

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

2.9.1 Pengaruh *Good Government Governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Good Government Governance merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Pemerintah Daerah dituntut untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip dasar akuntansi yaitu transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan (Maulana, 2021). Tata kelola pemerintah yang baik merepresentasikan pengelolaan keuangan dan sumber daya yang baik, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu, semakin baik tata kelola pemerintah, laporan keuangan yang dihasilkan dapat semakin berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2021); Nirwana & Darmawaty (2023); Philadhelpia *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.2 Pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses atau tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengawasi kinerja dan mencegah adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dapat mendukung pemerintah dalam mencapai sasaran manajemen dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan adanya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Alani, 2022). Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Internal berperan penting dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas yang memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik, maka memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2023) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti *et al.*, (2020) dan Qomah & Ismunawan (2021) juga menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.3 Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi kriteria kualitatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mencakup relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan memenuhi ukuran-ukuran normatif dapat disebut sebagai laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas (Asdi & Munari, 2023). Standar Akuntansi Pemerintahan adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka dari itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektif dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2023); Maydiyanti *et al.*, (2020); Qomah & Ismunawan (2021) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.4 Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

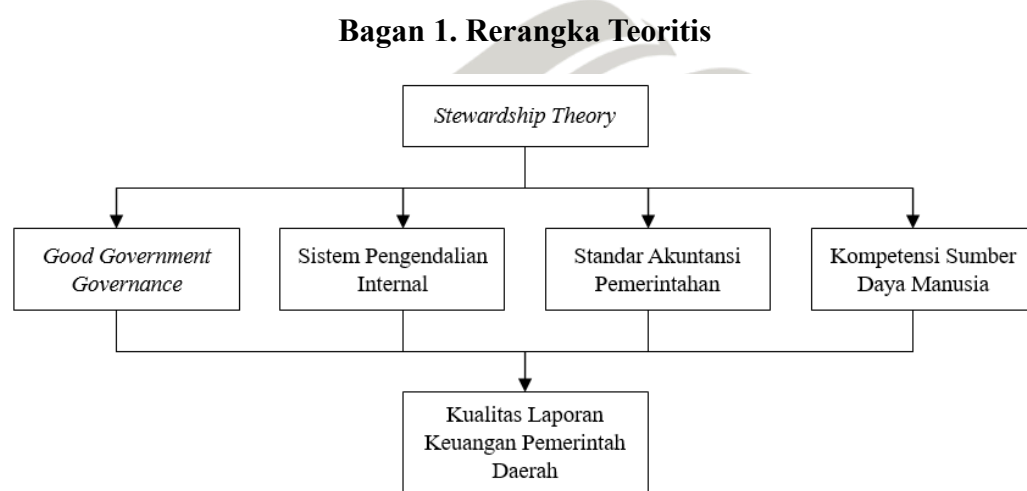
Sumber Daya Manusia merupakan komponen pertama dan utama dari setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Mitjo *et al.*, (2022). Dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mana memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidangnya, yaitu akuntansi pemerintah serta memahami tanggung jawab yang telah dilimpahkan. Sumber daya yang kompeten dalam pengelolaan keuangan merupakan faktor kunci yang menciptakan integritas keuangan (Rahmawati *et al.*, 2022). Dengan terciptanya integritas keuangan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Bawono *et al.*, (2021) dan Haryanto (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis keempat yaitu sebagai berikut:

H4: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.10 Rerangka Teoretis

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan maka kerangka teoritis digambarkan sebagai berikut:

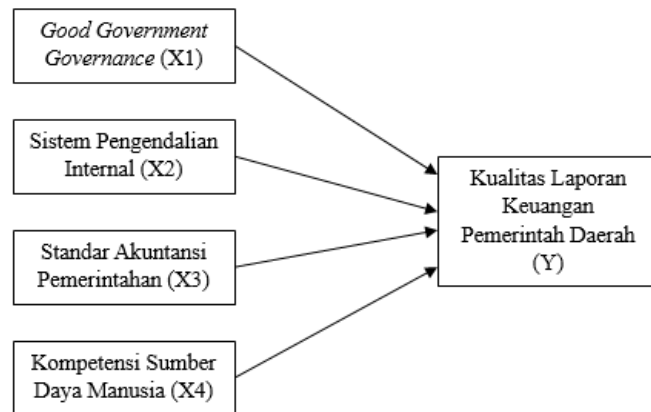


Sumber: Data diolah (2024)

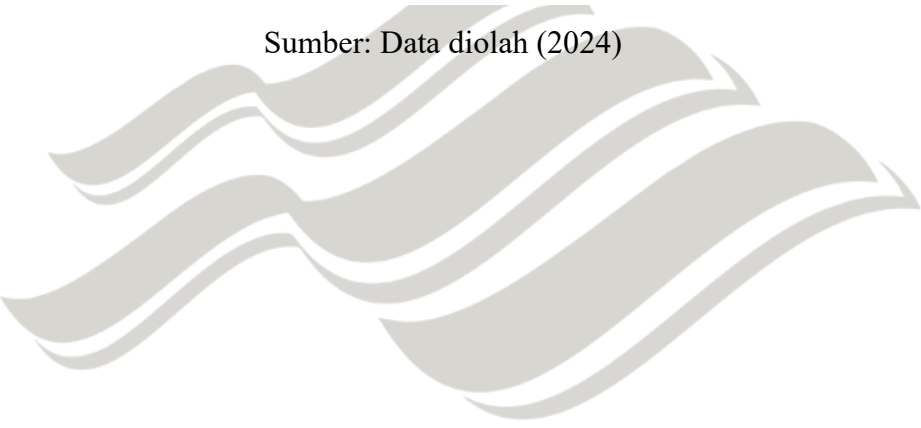
2.11 Desain Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan mengenai faktor-faktor dan komponen yang memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka desain penelitian digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2. Desain Penelitian



Sumber: Data diolah (2024)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan meneliti populasi atau sampel tertentu. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan berdasarkan filsafat positivisme (Sugiyono, 2016). Data dari penelitian kuantitatif berupa numerikal dan dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kausalitas kuantitatif. Pendekatan kausal mengkaji hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam hubungan kausal, terdapat variabel dependen sebagai akibat dan variabel independen sebagai sebab (Sugiyono, 2013). Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang menggunakan metode survei untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan pendapat dari beberapa responden yang representatif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif atau data dan informasi yang didapatkan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2013). Sumber data yang pada penelitian ini adalah data primer. Data ini diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli dan bukan melalui perantara. Data primer dari penelitian ini berupa jawaban dari responden yang diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar dengan pihak yang mengisi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara SKPD, serta pegawai bidang akuntansi dan pelaporan. Sedangkan, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki bagian khusus yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaporan keuangan.
2. Telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat SKPD sesuai dengan standar yang berlaku dan dalam periode yang telah ditetapkan.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei. Peneliti akan melakukan survei dengan mendistribusikan kuesioner atau angket kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Blitar. Kuesioner ini berisi daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang mana didistribusikan dalam bentuk *google form*. Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner tertutup, yaitu responden hanya dapat memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti untuk menjawab pernyataan yang ada. Proses pengisian kuesioner oleh responden dilakukan secara langsung dengan memilih salah satu jawaban dari daftar pilihan jawaban pada formulir (*form*)

yang telah diberikan. Selain itu, telah terdapat penjelasan mengenai tujuan serta tata cara pengisian kuesioner, sehingga dapat membantu dan mempermudah pengisian oleh responden. Data yang didapatkan dari pengisian kuesioner akan masuk ke dalam *google spreadsheet* yang telah terhubung dengan *google form* dan digunakan untuk mengetahui faktor determinan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Blitar.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah dapat disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas atau variabel independen (Sugiyono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Dependen

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Alat ukur	Skala data	Skor
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan di tingkat SKPD yang memuat informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif sehingga akuntabel dan dapat diandalkan	1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat dipahami	Kuesioner	4- <i>Likert</i>	1= sangat tidak setuju 2= tidak setuju 3= setuju 4= sangat setuju

Sumber: Data diolah (2024)

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen dapat disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, atau variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Good Government Governance* atau tata kelola pemerintah yang baik, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Independen

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Alat ukur	Skala data	Skor
<i>Good Government Governance</i>	Suatu struktur atau proses pengambilan keputusan sebagai pedoman dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi	1) Bertanggungjawab 2) Transparansi 3) Integritas dan kepatuhan hukum 4) Efisiensi dan efektivitas	Kuesioner	4-Likert	1= sangat tidak setuju 2= tidak setuju 3= setuju 4= sangat setuju
Sistem Pengendalian Internal	Tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang oleh pimpinan dan pegawai agar dapat mencapai tujuan organisasi	1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Aktivitas pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian internal	Kuesioner	4-Likert	1= sangat tidak setuju 2= tidak setuju 3= setuju 4= sangat setuju
Standar Akuntansi Pemerintahan	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah	1) PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan 2) PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran 3) PSAP No. 3 tentang laporan arus kas 4) PSAP No. 4 tentang catatan atas laporan keuangan	Kuesioner	4-Likert	1= sangat tidak setuju 2= tidak setuju 3= setuju 4= sangat setuju

(dilanjutkan.....)

(.....lanjutan)

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Alat ukur	Skala data	Skor
		5) PSAP No. 5 tentang akuntansi persediaan			
		6) PSAP No. 6 tentang akuntansi investasi			
		7) PSAP No. 7 tentang aset tetap			
		8) PSAP No. 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan			
		9) PSAP No. 9 tentang akuntansi kewajiban			
		10) PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan			
		11) PSAP No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi			
		12) PSAP No. 12 tentang laporan operasional			
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan	1) Pengetahuan 2) Keterampilan 3) Sikap dan perilaku	Kuesioner	4-Likert	1= sangat tidak setuju 2= tidak setuju 3= setuju 4= sangat setuju

Sumber: Data diolah (2024)

3.6 Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel dependen yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Seluruh pernyataan yang termuat dalam kuesioner penelitian

ini diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi terkait dengan variabel yang akan diteliti. Masing-masing variabel menggunakan instrumen yang diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alani (2022) dan Rahma (2019). Berikut merupakan kisi-kisi instrumen yang dimuat dalam kuesioner.

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Kuesioner

No.	Variabel	Indikator	No. Butir	Referensi
1.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Relevan	1,2,3,4	Alani (2022)
		Andal	5,6,7,8,9	
		Dapat dibandingkan	10	
		Dapat dipahami	11	
2.	<i>Good Government Governance</i>	Bertanggungjawab	1,2,3	Alani (2022)
		Transparansi	4,5,6	
		Integritas dan kepatuhan hukum	7,8	
		Efisiensi dan efektivitas	9,10	
3	Sistem Pengendalian Internal	Lingkungan pengendalian	1,2,3	Alani (2022)
		Penilaian risiko	4,5,6	
		Aktivitas pengendalian	7,8	
		Informasi dan komunikasi	9,10,11	
		Pemantauan pengendalian internal	12,13,14	
4.	Standar Akuntansi Pemerintahan	PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan	1,2,3	Rahma (2019)
		PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran	4,5,6	
		PSAP No. 3 tentang laporan arus kas	7,8	
		PSAP No. 4 tentang catatan atas laporan keuangan	9	
		PSAP No. 5 tentang akuntansi persediaan	10,11	
		PSAP No. 6 tentang akuntansi investasi	12	
		PSAP No. 7 tentang aset tetap	13,14	

(dilanjutkan.....)

(.....lanjutan)

No.	Variabel	Indikator	No. Butir	Referensi
		PSAP No. 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan	15,16	
		PSAP No. 9 tentang akuntansi kewajiban	17	
		PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan	18	
		PSAP No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi	19	
		PSAP No. 12 tentang laporan operasional	20	
5.	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pengetahuan	1,2,3	Alani (2022)
		Keterampilan	4,5,6	
		Sikap dan perilaku	7,8,9	

Sumber: Data diolah (2024)

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 4-*Likert*. Skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur pendapat atau persepsi seseorang maupun sekelompok orang terkait fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Skala *likert* yang digunakan berdimensi 4, dengan rentang nilai 1 sampai 4.

Tabel 5. Skor Skala 4-Likert

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data diolah (2024)

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing variabel yaitu *mean*, *median*, nilai *maximum* dalam

variabel sampel, nilai *minimum* dalam variabel sampel, dan standar deviasi atau simpangan baku

3.7.2 Uji *Outer Model*

1. Uji *Convergent Validity*

Uji *Convergent Validity* digunakan untuk mengukur seberapa besar keterkaitan indikator-indikator yang digunakan dengan konstruk atau variabel laten. Validitas konvergen mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan secara konsisten menggambarkan dan mendasari satu variabel laten tertentu. Apabila nilai outer loadings $> 0,707$, maka memenuhi validitas konvergen dan memiliki nilai validitas yang tinggi (Chin, 1998).

2. *Average Variance Extraced* (AVE)

AVE digunakan untuk mengukur seberapa baik validitas konvergen dan seberapa besar satu variabel laten mampu menjelaskan varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata. Apabila nilai AVE $> 0,5$, maka menggambarkan validitas konvergen yang baik dan memiliki arti bahwa variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata (Ghozali, 2018).

3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur ketika dilakukan pengukuran ulang atau memastikan alat ukur tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten. Penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,7$, maka dinyatakan reliabel (Ghozali, 2018).

3.7.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi atau tidak. Data dianggap tidak memiliki gejala multikolinearitas jika memiliki nilai VIF kurang dari 5 (Sarstedt *et al.*, 2017).

3.7.4 Uji Inner Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Apabila nilai *Adjusted R-Square* semakin besar dan mendekati nilai 1, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai *Adjusted R-Square* semakin kecil dan mendekati nilai 0, maka variabel independen berpengaruh kecil terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Apabila nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,67, 0,33, dan 0,19 maka dikatakan sebagai kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998).

3.7.5 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan menggunakan teknik *bootstrapping* serta analisis *path coefficients* (koefisien jalur). Koefisien jalur berfungsi sebagai penilai arah dan kekuatan hubungan antar variabel dalam model serta menentukan tingkat signifikansi. Nilai koefisien jalur yang mendekati +1 menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat, sedangkan nilai koefisien jalur yang mendekati -1 menunjukkan adanya hubungan negatif. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (*p value*) hasil *bootstrapping*. Apabila

nilai $p\text{ value} < 0,05$ maka hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai $p\text{ value} > 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan (Sarstedt *et al.*, 2017).

3.8 Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{01} : *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_{a1} : *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_{02} : Penerapan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_{a2} : Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_{03} : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan Pemerintah Daerah.

H_{a3} : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan Pemerintah Daerah.

H_{04} : Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_{a4} : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi dan unit analitis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar. Sampel pada penelitian ini terdapat pada Lampiran 2 dan berikut merupakan ringkasan hasil kriteria sampel dan pihak yang mengisi kuesioner:

Tabel 6. Rincian Jumlah Sampel

No	Keterangan	SKPD	Pihak yang Mengisi	Jumlah
1	Memiliki bagian khusus yang bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaporan keuangan serta telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat SKPD sesuai dengan standar yang berlaku dan dalam periode yang telah ditetapkan	68	a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD	29
			b. Bendahara SKPD	72
			c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan	5
	TOTAL	68		106

Sumber: Data diolah (2025)

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Kuesioner didistribusikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar yang memenuhi kriteria sampel yaitu sebanyak 106 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang didistribusikan, terdapat 105 kuesioner yang kembali dan dapat diuji. Penyebaran hingga penarikan kuesioner dilakukan dengan jangka waktu 3 bulan (April-Juni) sesuai dengan perizinan yang telah diberikan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar. Berikut merupakan rangkuman pendistribusian dan penarikan kuesioner.

Tabel 7. Data Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang didistribusikan	106	100%
2.	Kuesioner yang kembali	105	99%
3.	Kuesioner yang tidak kembali	1	1%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	105	99%

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 8. Data Distribusi Kuesioner

No	SKPD	PPK-SKPD		Bendahara SKPD		Bagian Akuntansi dan Pelaporan	
		Dis t	Kembal i	Dis t	Kembal i	Dis t	Kembal i
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1	1	0	0
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	2	2	0	0
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	1	1	1	0	0
4	Dinas Kesehatan	1	1	1	1	0	0
5	Puskesmas Kepanjenkidul	0	0	1	1	0	0
6	Puskesmas Sananwetan	0	0	1	1	0	0
7	Puskesmas Sukorejo	0	0	1	1	0	0
8	RSUD Mardi Waluyo	0	0	1	1	0	0
9	BPBD	1	1	1	1	0	0
10	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	1	0	0
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	1	0	0
12	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	1	1	1	1	0	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	1	0	0
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	1	1	1	0	0
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	1	1	0	0
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	1	1	0	0
17	Dinas Penanaman Modal	1	1	1	1	0	0
18	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	0	0
19	UPT SMPN 1	0	0	1	1	0	0
20	UPT SMPN 2	0	0	1	1	0	0
21	UPT SMPN 3	0	0	1	1	0	0
22	UPT SMPN 4	0	0	1	1	0	0
23	UPT SMPN 5	0	0	1	1	0	0
24	UPT SMPN 6	0	0	1	1	0	0

(dilanjutkan....)

No	SKPD	PPK-SKPD		Bendahara SKPD		Bagian Akuntansi dan Pelaporan	
		Dis t	Kembal i	Dis t	Kembal i	Dis t	Kembal i
25	UPT SMPN 7	0	0	1	1	0	0
26	UPT SMPN 8	0	0	1	1	0	0
27	UPT SMPN 9	0	0	1	1	0	0
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	2	2	0	0
29	Dinas Perhubungan	1	1	1	1	0	0
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	1	0	0
31	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	1	2	2	0	0
32	Dinas Sosial	1	1	1	1	0	0
33	Inspektorat Daerah	1	1	1	1	0	0
34	Kecamatan Kepanjenkidul	1	1	1	1	0	0
35	Kecamatan Sukoarjo	1	1	1	1	0	0
36	Kecamatan Sananwetan	1	1	1	1	0	0
37	Kelurahan Bendo	0	0	1	1	0	0
38	Kelurahan Bendogerit	0	0	1	1	0	0
39	Kelurahan Blitar	0	0	1	1	0	0
40	Kelurahan Gedog	0	0	1	1	0	0
41	Kelurahan Karang Sari	0	0	1	1	0	0
42	Kelurahan Karangtengah	0	0	1	1	0	0
43	Kelurahan Kauman	0	0	1	1	0	0
44	Kelurahan Kepanjenkidul	0	0	1	1	0	0
45	Kelurahan Kepanjenlor	0	0	1	1	0	0
46	Kelurahan Klampok	0	0	1	1	0	0
47	Kelurahan Ngadirejo	0	0	1	1	0	0
48	Kelurahan Pakunden	0	0	1	1	0	0
49	Kelurahan Plosokerep	0	0	1	1	0	0
50	Kelurahan Rembang	0	0	1	1	0	0
51	Kelurahan Sananwetan	0	0	1	1	0	0
52	Kelurahan Sentul	0	0	1	1	0	0
53	Kelurahan Sukorejo	0	0	1	1	0	0
54	Kelurahan Tanggung	0	0	1	1	0	0
55	Kelurahan Tanjungsari	0	0	1	1	0	0
56	Kelurahan Tlumpu	0	0	1	1	0	0
57	Kelurahan Turi	0	0	1	1	0	0
58	BKPSDM	1	1	1	1	0	0
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	1	1	0	0
60	Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	1	1	1	1	5	4
61	Bappeda	1	1	1	1	0	0
62	Bagian Hukum	0	0	1	1	0	0
63	Bagian Layanan dan Pengadaan Jasa	0	0	1	1	0	0

(dilanjutkan.....)

(.....lanjutan)

No	SKPD	PPK-SKPD		Bendahara SKPD		Bagian Akuntansi dan Pelaporan	
		Dis t	Kembal i	Dis t	Kembal i	Dis t	Kembal i
64	Bagian Organisasi	0	0	1	1	0	0
65	Bagian Pemerintahan	0	0	1	1	0	0
66	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan	0	0	1	1	0	0
67	Bagian Umum	1	1	2	2	0	0
68	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0
69	DPRD	1	1	1	1	0	0
TOTAL		29	29	72	72	5	4
TOTAL KEMBALI		105					
TOTAL DISTRIBUSI		106					
PERSENTASE		99%					

Sumber: Data diolah (2025)

4.1.2 Deskripsi Responden

Berdasarkan data dari hasil penelitian, dapat dideskripsikan mengenai karakteristik responden pada tabel yang mana menggambarkan mengenai latar belakang pegawai pemerintah daerah yang menjabat sebagai PPK-SKPD, Bendahara SKPD, dan Bagian Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 9. Karakteristik Responden

Data	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	66	63%
	Laki-Laki	39	37%
Umur	> 55 th	12	11%
	36-45 th	32	30%
	25-35 th	16	15%
	46-55 th	44	42%
	<25 th	1	1%
Pendidikan	Tanpa Gelar	7	7%
	SMA/SMK	40	38%
	D3	16	15%
	D4/S1	37	35%
	S2	5	5%
Jurusan	Akuntansi	25	24%

(dilanjutkan.....)

(.....lanjutan)

Data	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
	Manajemen	10	10%
	Administrasi	8	8%
	Ekonomi	2	2%
	Lainnya	60	57%
Lama Bekerja	>10 th	85	81%
	1-5 th	17	16%
	6-10 th	3	3%

Sumber: Data diolah (2025)

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 10. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
<i>Good Government Governance</i> (x1)	105	2,50	4	3,48	0,447
Sistem Pengendalian Internal (x2)	105	2,43	4	3,36	0,475
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (x3)	105	2,45	4	3,45	0,461
Kompetensi Sumber Daya Manusia (x4)	105	2,11	4	3,30	0,450
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (y)	105	2,73	4	3,51	0,436

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, terdapat 105 responden. Dari data tersebut dapat diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut:

a. *Good Government Governance*

Good Government Governance memiliki rata-rata sebesar 3,48 dengan deviasi standar sebesar 0,447. Nilai minimum dari *Good Government Governance* adalah 2,5 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.

b. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal memiliki rata-rata sebesar 3,36 dengan deviasi standar sebesar 0,475. Nilai minimum dari Sistem Pengendalian Internal adalah 2,43 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.

c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki rata-rata sebesar 3,45 dengan deviasi standar sebesar 0,461. Nilai minimum dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 2,45 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.

d. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki rata-rata sebesar 3,30 dengan deviasi standar sebesar 0,450. Nilai minimum dari Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah 2,11 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.

e. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki rata-rata sebesar 3,51 dengan deviasi standar sebesar 0,436. Nilai minimum dari Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 2,73 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.

4.3 Uji Outer Model

4.3.1 Uji *Convergent Validity*

Tabel 11. Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Item	Nilai Outer Loading	Keputusan
<i>Good Government Governance</i> (X1)	Item1	0,767	Valid
	Item2	0,769	Valid
	Item3	0,791	Valid

(dilanjutkan.....)

Variabel	Item	Nilai Outer Loading	Keputusan
	Item4	0,780	Valid
	Item5	0,744	Valid
	Item6	0,778	Valid
	Item7	0,766	Valid
	Item8	0,804	Valid
	Item9	0,783	Valid
	Item10	0,779	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X2)	Item1	0,784	Valid
	Item2	0,784	Valid
	Item3	0,843	Valid
	Item4	0,834	Valid
	Item5	0,791	Valid
	Item6	0,794	Valid
	Item7	0,750	Valid
	Item8	0,816	Valid
	Item9	0,832	Valid
	Item10	0,842	Valid
	Item11	0,784	Valid
	Item12	0,794	Valid
	Item13	0,800	Valid
	Item14	0,865	Valid
Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)	Item1	0,804	Valid
	Item2	0,832	Valid
	Item3	0,791	Valid
	Item4	0,820	Valid
	Item5	0,824	Valid
	Item6	0,796	Valid
	Item7	0,769	Valid
	Item8	0,777	Valid
	Item9	0,793	Valid
	Item10	0,807	Valid
	Item11	0,806	Valid
	Item12	0,769	Valid
	Item13	0,783	Valid
	Item14	0,784	Valid
	Item15	0,784	Valid
	Item16	0,784	Valid
	Item17	0,777	Valid

(dilanjutkan.....)

(.....lanjutan)

Variabel	Item	Nilai Outer Loading	Keputusan
	Item18	0,794	Valid
	Item19	0,771	Valid
	Item20	0,811	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	Item1	0,799	Valid
	Item2	0,803	Valid
	Item3	0,795	Valid
	Item4	0,784	Valid
	Item5	0,784	Valid
	Item6	0,786	Valid
	Item7	0,799	Valid
	Item8	0,799	Valid
	Item9	0,802	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Item1	0,811	Valid
	Item2	0,816	Valid
	Item3	0,810	Valid
	Item4	0,828	Valid
	Item5	0,817	Valid
	Item6	0,781	Valid
	Item7	0,775	Valid
	Item8	0,787	Valid
	Item9	0,798	Valid
	Item10	0,780	Valid
	Item11	0,793	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan uji validitas, seluruh item pada masing-masing variabel memiliki nilai *outer loading* lebih dari 0,707. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur pada penelitian.

4.3.2 Average Variance Extraced (AVE)

Tabel 12. Average Variance Extraced (AVE)

	<i>Average Variance Extraced (AVE)</i>
<i>Good Goverment Governance (X1)</i>	0,603
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,655

(dilanjutkan.....)

(.....lanjutan)

	<i>Average Variance Extraced (AVE)</i>
Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)	0,631
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	0,631
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,640

Sumber: Data diolah, 2025

Nilai AVE dari variabel *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 0,603, 0,655, 0,631, 0,631, dan 0,640. Nilai ini lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen memadai dan masing-masing variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata.

4.3.3 Uji Reliabilitas

Tabel 13. Uji Reliabilitas Outer Model

Variabel	<i>Cornbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keputusan
<i>Good Goverment Governance</i> (X1)	0,927	0,930	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,960	0,963	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)	0,969	0,971	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	0,928	0,939	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,944	0,945	Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,70. Hal ini menunjukkan konsistensi dan stabilitas yang tinggi pada instrumen yang digunakan. Dari hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa

seluruh konstruk dalam penelitian ini telah terbukti sebagai alat ukur yang sesuai dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

4.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 14. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
Good Government Governance (x1)	1,970
Sistem Pengendalian Internal (x2)	1,857
Standar Akuntansi Pemerintahan (x3)	1,164
Kompetensi Sumber Daya Manusia (x4)	1,484

Sumber: Data diolah (2025)

Nilai VIF dari variabel GGG, SPI, PSAP, dan Kompetensi SDM secara berturut-turut adalah 1,970, 1,857, 1,164, dan 1,484. Nilai VIF dari keempat variabel tidak lebih dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa terbebas dari masalah multikolinearitas.

4.5 Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 15. Hasil Uji R-Square

	R-square	R-square adjusted
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,629	0,614

Sumber: Data diolah (2025)

Nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,614 atau 61,4% menunjukkan bahwa variabel x yaitu *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat menjelaskan variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 61,4%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 38,6% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.6 Uji Hipotesis

Tabel 16. Hasil Uji Hipotesis GGG, SPI, PSAP, SDM terhadap Kualitas LKPD

	<i>Original Sample</i>	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>	Keterangan
GGG	0,258	2,229	0,013	Berpengaruh
SPI	0,078	0,669	0,252	Tidak Berpengaruh
PSAP	0,293	2,879	0,002	Berpengaruh
SDM	0,393	4,325	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data diolah (2025)

- a. *Good Government Governance* memiliki nilai *original sample* 0,258 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Peningkatan *Good Government Governance* akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,258. Variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yang ditunjukkan oleh nilai *T-statistics* sebesar 2,229 ($>1,65$) dan *p-value* sebesar 0,013 ($<0,05$). Dengan demikian, *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak.
- b. Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai *original sample* 0,078 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,078. Variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y yang ditunjukkan oleh nilai *T-statistics* sebesar 0,669 ($<1,65$) dan *p-value* sebesar 0,252 ($>0,05$). Dengan demikian, Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak.

- c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai *original sample* 0,293 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Peningkatan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,293. Variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yang ditunjukkan oleh nilai *T-statistics* sebesar 2,879 ($>1,65$) dan *p-value* sebesar 0,002 ($<0,05$). Dengan demikian, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.
- d. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai *original sample* 0,393 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,393. Variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yang ditunjukkan oleh nilai *T-statistics* sebesar 4,325 ($>1,65$) dan *p-value* sebesar 0,000 ($<0,05$). Dengan demikian, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak.

4.7 Pembahasan

4.7.1 *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel *Good Government Governance* atau tata kelola pemerintah yang baik memiliki nilai *p value* sebesar 0,013 dengan nilai *path coefficient* 0,258

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Government Governance*. Zai *et al.* (2020), mengungkapkan bahwa dalam mencapai kualitas laporan keuangan pemerintahan yang baik harus mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai perwujudan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan daerah.

Semakin baik pemerintah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan karena prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan integritas mendorong pengelolaan keuangan yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun kebijakan, transparansi penggunaan dana kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan efisien merupakan praktik prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang secara nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nirwana & Darmawaty (2023) dan Zai *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.7.2 Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai *p value* sebesar 0,252 dengan nilai *path coefficient* 0,078 terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SKPD belum sepenuhnya mampu melaksanakan dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal dengan baik. Hal ini juga ditunjukkan oleh fakta pengungkapan beberapa kasus korupsi yang menjadi bukti konkret bahwa SPI tidak berjalan dengan efektif. Sumaryati *et al.*, (2020) mengungkapkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Internal yang tidak optimal menyebabkan SPI tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Blitar memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa laporan keuangan berkualitas baik. Hal ini karena Kota Blitar berhasil memastikan laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi standar kewajaran material yang disyaratkan oleh BPK. Keberadaan SDM yang kompeten yang mampu menyusun serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dapat menopang kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumaryati *et al.*, (2020) dan Philadhelpia *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Meskipun laporan keuangan mendapatkan opini WTP, Sistem Pengendalian Internal masih belum diimplementasikan dengan efektif.

4.7.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai *p value* sebesar 0,002 dengan nilai *path coefficient* 0,293 terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan efektif dan penyusunan laporan keuangan telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hidayat *et al.* (2021), menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menentukan prasyarat normatif yang perlu diterapkan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang baik, sehingga dalam menyusun dan melaporkan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan yang telah ditetapkan.

Penerapan PSAP meningkatkan kualitas laporan keuangan karena PSAP berfungsi sebagai pedoman yang baku dan sistematis dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah. Dengan menerapkan PSAP, laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, informasi yang disajikan tepat waktu untuk pengambilan keputusan, serta terbebas

dari kesalahan yang bersifat material. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti penggunaan basis akrual dalam pengakuan aset dan kewajiban, penggunaan basis kas dalam pengakuan beban dan pendapatan, serta penyusunan laporan konsolidasi yang mencakup laporan tingkat SKPD. Selain itu, laporan keuangan yang menerapkan PSAP dapat dibandingkan karena konsisten antarperiode dan entitas serta informasi yang disajikan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2023) dan Maulana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.7.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai *p value* sebesar 0,000 dengan nilai *path coefficient* 0,393 terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia pada bagian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Blitar kompeten dan dapat menyusun serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Sumber Daya Manusia pada bagian pengelolaan keuangan telah memahami aturan dalam penyusunan laporan keuangan serta menerapkan pembagian tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan yang dimiliki.

Dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, Sumber Daya Manusia sangat signifikan dan menjadi pendorong utama suatu entitas (Pramudita *et al.*, 2024). Keberhasilan dalam mencapai kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan memahami standar yang berlaku. Hal ini karena SDM yang kompeten memiliki pemahaman terhadap peraturan dan standar yang berlaku sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, SDM yang kompeten mampu membuat, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan, serta mengetahui kewajiban, kode etik, dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bawono *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.8 Impikasi Penelitian

4.8.1 Implikasi Teoretis

Stewardship theory yang dicetuskan oleh Donaldson & Davis (1991) menjelaskan situasi ketika pemerintah yang bertindak sebagai manajer berfokus pada akuntabilitas dan pelayanan kepada publik yang bertindak sebagai pemilik alih-alih kepentingan pribadi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam teori ini, manajer dipercaya memiliki integritas tinggi dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya serta memiliki kepentingan yang sejalan dengan pemilik untuk kepentingan utama organisasi (Zanra, 2024). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa *Good Government Governance* (GGG), Standar Akuntansi Pemerintahan

(PSAP), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil ini menguatkan pandangan dalam teori *stewardship* yang menyebut bahwa dalam lingkungan organisasi publik hubungan bersifat kooperatif. Nilai-nilai seperti transparansi, tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan pada prinsip tata kelola sangat menentukan kualitas hasil kerja yang mana tidak memerlukan pengawasan yang ketat atau mekanisme kontrol yang kompleks (Zanra, 2024). Seperti yang dijelaskan oleh Nirwana & Darmawaty (2023), tata kelola yang memenuhi prinsip-prinsip yang ada mencerminkan pelayanan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya secara efektif untuk kesejahteraan publik. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia dan PSAP sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan laporan yang disajikan.

Sementara itu, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan atau kontrol yang formal tidak cukup untuk menjamin kualitas laporan keuangan tanpa didukung dengan pelaksana yang memiliki integritas dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus ditunjang oleh budaya organisasi dan nilai-nilai moral individu (Wahyudin, 2022). Namun demikian, keberadaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) tetap sangat diperlukan sebagai fondasi struktural dalam mencegah penyimpangan, mendeteksi kesalahan, serta memastikan kepatuhan terhadap

prosedur yang berlaku, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi dan integritas para pelaksana. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini memperluas pemahaman bahwa dalam lingkup pemerintahan daerah, kualitas dari laporan keuangan yang disajikan tidak hanya ditentukan oleh sistem pengendalian atau pengawasan yang hanya bersifat administratif tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia serta penerapan standar yang berlaku. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan keseimbangan antara struktur formal dengan nilai-nilai akuntabilitas yang menjadi dasar dari *stewardship theory*.

4.8.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang penting bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. *Good Government Governance*, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sumber Daya Manusia yang kompeten berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam *Good Government Governance*, pemahaman yang baik terhadap aturan-aturan akuntansi, dan tingginya kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Daerah juga perlu memberikan fasilitas seperti sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat daerah, sehingga mampu memahami dan mengimplementasikan perkembangan kebijakan akuntansi yang berlaku. Selain itu,

pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan memiliki keahlian yang relevan serta mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bukan seharusnya untuk diabaikan. Namun, hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelaksanaan SPI belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pengendalian internal atau lemahnya budaya organisasi. Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem pelaporan keuangan yang andal, karena mampu mendeteksi kesalahan atau penyimpangan dan mampu meminimalisir kecurangan (Indrayani & Widiastuti, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi sistem pengendalian yang telah ada baik secara struktur maupun dalam hal pelaksanaan, memperbaiki kelemahan dan risiko yang ditemukan, serta memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal telah diterapkan secara optimal dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Government Governance*, penerapan Sistem Pengendalian Internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar dengan melibatkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara SKPD, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Government Governance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa SKPD Kota Blitar belum sepenuhnya mampu melaksanakan dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal dengan baik. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan efektif dan penyusunan laporan keuangan telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumber Daya Manusia pada bagian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Blitar kompeten dan dapat menyusun serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung *stewardship theory* yang terkait dengan situasi ketika pemerintah yang bertindak sebagai manajer berfokus pada akuntabilitas dan pelayanan kepada publik yang bertindak sebagai pemilik. Pemerintah lebih mementingkan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi dalam mencapai tujuan organisasi. Tata kelola pemerintahan yang baik, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang tinggi dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara itu, penerapan Sistem Pengendalian Internal yang tidak optimal dan tidak didukung dengan integritas serta tanggungjawab tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi empiris bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi Sumber Daya Manusia, dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan *Good Government Governance*, penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan, dan Sumber Daya Manusia yang kompeten dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah apabila penerapannya tidak optimal dan tidak didukung oleh integritas dan akuntabilitas yang kuat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan daerah, memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta mengevaluasi, memperbaiki, dan memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal diterapkan secara optimal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui yaitu sebagai berikut:

1. Interaksi langsung dengan responden diperlukan untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap isi kuesioner dan keakuratan dalam pengisian. Namun, dalam penelitian ini mekanisme penyebaran kuesioner dilakukan melalui satu SKPD yaitu BPKAD kepada masing-masing SKPD, sehingga peneliti tidak dapat berinteraksi langsung dengan responden.
2. Kuesioner bersifat *self-sassesment* yang dapat menimbulkan bias dan mengurangi objektivitas.
3. Pengisian kusioner memakan waktu yang cukup lama karena rendahnya tingkat respons dan perhatian dari sebagian SKPD.

5.3 Saran

Dengan didasari oleh hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, mengikuti perkembangan standar akuntansi yang berlaku, memperhatikan kompetensi dari sumber daya manusia yang terlibat, serta mengevaluasi dan memastikan Sistem Pengendalian Internal yang ada telah dilaksanakan secara optimal.

2. Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian di tingkat provinsi agar dapat lebih representatif dan dapat mencerminkan kondisi yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti budaya organisasi, sistem informasi keuangan daerah, dan audit internal/eksternal, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alani, V. M. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen*. Universitas Islam Indonesia.
- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 44–62. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10944>
- Asdi, & Munari. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 11(2), 202–211.
- Azzindani, R., & M. Irwan. (2020). Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 31–54. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.31>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024*.
- Bawono, I. R., Suroso, A., & Yuniarso, G. P. (2021a). Assessing Effect of The Factors that Influence Financial Reporting Information Quality. *AKRUAL*:

- Jurnal Akuntansi*, 12(2), 107–116. <https://doi.org/10.26740/jaj.v12n2.p107-116>
- Bawono, I. R., Suroso, A., & Yuniarso, G. P. (2021b). Assessing Effect of The Factors that Influence Financial Reporting Information Quality. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 107–116. <https://doi.org/10.26740/jaj.v12n2.p107-116>
- BPK. (2020). *Ragam Opini BPK*. BPK RI. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling* (G. A. Marcoulides, Ed.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://www.researchgate.net/publication/311766005>
- Direktorat Jendral Perbendaharaan. (2022). *Standar Akuntansi Pemerintah, PP 71 Tahun 2010*. Kemenkeu Learning Center. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/standar-akuntansi-pemerintah-pp-71-tahun-2010-563ef849/detail/>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–66.
- Fitriani, A., Sjarlis, S., & Waluyo, H. S. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompensasi Dan KompetensiPengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Pusaran Manajemen*, 2(2), 123–133.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 edisi 9 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustina, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Haryanto. (2023a). Determinants of The Reliability of SKPD Financial Statements. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 14(2), 219–233. <https://doi.org/10.26740/jaj.v14n2.p219-233>
- Haryanto. (2023b). Determinants of The Reliability of SKPD Financial Statements. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 14(2), 219–233. <https://doi.org/10.26740/jaj.v14n2.p219-233>
- Hidayat, D., Sari, M., & AR, F. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Valuta*, 7(1), 1–13.
- Ibrahim, S. D., Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 412–423.
- Inayati, Arifuddin, & Amiruddin. (2024). Pengaruh Good Government Governance Dan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Budaya Organisasi Sebagai Pemoderasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3836–3852.

- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020a). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020b). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Jauhari, H., Hazisma, S., & Dewata, E. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104–121. <https://doi.org/10.30656/Jak.V8i1.2487>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.

- Kewo, C. L., & Tanor, L. A. O. (2020). Apakah Good Government Governance dan Pengendalian Intern dapat Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik? *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 930–935.
- Kompas.com. (2022, February 6). Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut UNBP. *Kompas.Com*.
- Maulana M, R. (2021a). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(1), 126–137. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i1.1013>
- Maulana M, R. (2021b). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(1), 126–137. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i1.1013>
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69–78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Mitjo, F. S., Kawatu, F. S., & Tangkau, J. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 234–241.
- Nilamsari, Y., Sukesti, F., Alwiyah, A., Hanum, A. N., & Agung Santoso, R. E. W. (2020). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi OPD Kota

- Semarang. *Maksimum: Media Akuntansii Universitas Muhammadiyah Semarang*, 10(2), 85–94. <https://doi.org/10.26714/mki.10.2.2020.85-94>
- Nirwana, & Darmawaty. (2023a). The Effect of Good Governance on The Financial Statements Quality. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.594>
- Nirwana, & Darmawaty. (2023b). The Effect of Good Governance on The Financial Statements Quality. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.594>
- Pemerintah Kota Blitar. (2024). *Satu-satunya di Jawa Timur, Kota Blitar Raih Opini WTP ke 14 Kali Berturut-turut*. Blitarkota. <https://blitarkota.go.id/berita/satu-satunya-di-jawa-timur-kota-blitar-raih-opini-wtp-ke-14-kali-berturut-turut>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Philadhelpia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020a). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Philadhelpia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020b). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Pramudita, I. D., Julianti, M., Putri, R. E., Ananda, S., & Rodiah, S. (2024). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Literature Review. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 7(1), 1.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* (P. C. Ambarwati, Ed.; 1st ed.). CV. Wade Group.
- Qomah, S., & Ismunawan. (2021a). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95–108. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718>
- Qomah, S., & Ismunawan. (2021b). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95–108. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Rahma, T. U. (2019). *Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasional, Pemanfaatan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.
- Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu Nur Kholid, A., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi.

- Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 346–359.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2944–2954.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Handbook of Market Research* (pp. 1–40). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-1
- Sarwono, N. R. U., & Munari, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manuasia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 616–622. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alfabeta*. CV. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumaryati, A., Novitasari, E. P., & Machmuddah, Z. (2020a). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.795>

- Sumaryati, A., Novitasari, E. P., & Machmuddah, Z. (2020b). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.795>
- Wahyudin, H. (2022). Budaya Organisasi. *Journal Medan Resource Center*, 3.
- Zai, F. P., Purba, S., & Nainggolan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 1–10.
- Zanra, S. W. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Profesionalisme terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi: JILAK*, 1(2), 40.

UNIVERSITAS
MA CHUNG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pengisian Kuesioner dilakukan oleh PPK-SKPD, bendahara (penerimaan/pengeluaran), dan staf bidang akuntansi dan keuangan yang telah bekerja minimal 1 tahun.
2. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden.
3. Untuk menjawab kuesioner, pilih satu jawaban yang sesuai pada daftar jawaban yang telah tersedia dengan keterangan sebagai berikut:
1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
2 : Tidak Setuju (TS)
3 : Setuju (S)
4 : Sangat Setuju (SS)
4. Setiap pernyataan harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintah yang Baik)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Bertanggungjawab					
1	OPD tempat saya bekerja selalu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun kebijakan.				
2	OPD tempat saya bekerja selalu merespons apabila terjadi keluhan masyarakat terkait dengan program kegiatan sesuai dengan tupoksi yang menjadi tanggung jawabnya.				
3	OPD tempat saya bekerja selalu menyelesaikan setiap keluhan masyarakat sesuai dengan tupoksinya dengan tepat waktu.				
Transparansi					
4	Peningkatan sistem komunikasi tiap-tiap organisasi dengan masyarakat dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat adalah penting.				
5	Penggunaan dana disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
6	Melakukan sosialisasi program dan kebijakan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.				
Integritas dan Kepatuhan Hukum					
7	OPD tempat saya bekerja mengikutsertakan pegawai dalam membuat kebijakan.				
8	OPD tempat saya bekerja memberlakukan hukum yang telah dibuat kepada seluruh pegawai.				
Efisiensi dan Efektivitas					
9	OPD tempat saya bekerja dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan berdasar prinsip efektivitas.				
10	OPD tempat saya bekerja selalu bekerja menggunakan prinsip efisiensi.				

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Lingkungan Pengendalian					
1	OPD tempat saya bekerja memiliki peraturan yang mengatur masalah etika perilaku dalam melakukan suatu pengendalian.				
2	Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau perilaku pegawai.				
3	Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian internal.				
Penilaian Risiko					
4	Pemimpin telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.				
5	Risiko pelaksanaan program dan kegiatan telah diidentifikasi di tiap tingkatan.				
6	Pemimpin mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko.				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Aktivitas Pengendalian					
7	Pemimpin selalu memiliki rencana pengelolaan pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.				
8	Pemimpin dan pegawai telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian.				
Informasi dan Komunikasi					
9	OPD tempat saya bekerja telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi untuk melaksanakan tanggung jawab.				
10	OPD tempat saya bekerja menyediakan informasi tepat waktu, memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat.				
11	OPD tempat saya bekerja membebaskan tugas dan mengkomunikasikan kepada pegawai dengan jelas dan mudah dipahami.				
Pemantauan Pengendalian Internal					
12	OPD tempat saya bekerja telah melakukan perbaikan pengendalian internal sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian internal.				
13	Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja selalu mengevaluasi dan mereview temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu adanya perbaikan.				
14	Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja menetapkan tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan dengan tepat.				

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan					
1	Penyusun laporan keuangan pada OPD tempat saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).				
2	OPD tempat saya bekerja telah menggunakan basis akrual untuk mengakui aset dan kewajiban.				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
3	OPD tempat saya bekerja telah menggunakan basis kas untuk mengakui pendapatan dan belanja.				
PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran					
4	OPD tempat saya bekerja telah mencatat pendapatan sesuai dengan asas bruto.				
5	OPD tempat saya bekerja telah mengakui pengeluaran dari rekening kas sebagai belanja.				
6	OPD tempat saya bekerja telah mengakui penerimaan pembiayaan saat diterima di rekening kas.				
PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas					
7	Telah menyusun Laporan Arus Kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.				
8	Telah menggunakan metode langsung dalam pencatatan arus kas operasi.				
PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan					
9	OPD tempat saya bekerja telah menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan.				
PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan					
10	OPD tempat saya bekerja telah mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah.				
11	OPD tempat saya bekerja telah melakukan pencatatan persediaan berdasarkan inventarisasi fisik.				
PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi					
12	OPD tempat saya bekerja telah mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur.				
PSAP No. 7 tentang Aset Tetap					
13	OPD tempat saya bekerja telah mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
14	OPD tempat saya bekerja telah mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan.				
PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan					
15	OPD tempat saya bekerja telah mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan.				
16	OPD tempat saya bekerja telah memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap jika pengerjaan konstruksi telah selesai.				
PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban					
17	Pada OPD tempat saya bekerja, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sesuai dengan nilai nominal.				
PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan					
18	OPD tempat saya bekerja telah melakukan koreksi yang merupakan tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya.				
PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi					
19	OPD tempat saya bekerja telah menyajikan laporan konsolidasi yang mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.				
PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional					
20	OPD tempat saya bekerja telah menyusun laporan operasional yang mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa pada periode akuntansi.				

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Pengetahuan					
1	Saya memahami PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan baik.				
2	Saya memiliki pemahaman terhadap peraturan dan standar pelaporan keuangan memengaruhi kualitas informasi.				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
3	Saya memahami pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi dengan baik.				
Keterampilan					
4	Saya mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan tepat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.				
5	Saya mampu memposting jurnal ke buku besar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.				
6	Saya mampu menyusun dan menyajikan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan baik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.				
Sikap dan Perilaku					
7	Saya mengetahui kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas.				
8	Saya menolak intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap aturan.				
9	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.				

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Relevan					
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD tempat saya bekerja mampu memberikan informasi yang dapat mengevaluasi kinerja di masa lalu.				
2	OPD tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.				
3	OPD tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi.				
4	OPD tempat saya bekerja memberikan informasi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.				
Andal					

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5	Transaksi yang disajikan oleh OPD tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.				
6	Informasi yang disajikan dalam OPD tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material.				
7	OPD tempat saya bekerja menyajikan informasi sebagai kebutuhan umum dan tidak berpihak pada pemangku kepentingan.				
8	OPD tempat saya bekerja informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji.				
9	Informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh OPD tempat saya bekerja teruji kebenarannya.				
Dapat Dibandingkan					
10	Informasi keuangan yang disajikan oleh OPD tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.				
Dapat Dipahami					
11	Informasi keuangan yang dihasilkan oleh OPD tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna.				

UNIVERSITAS
MA CHUNG

Lampiran 2. Sampel Penelitian

No.	SKPD
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Dinas Kesehatan
5	Puskesmas Kepanjenkidul
6	Puskesmas Sananwetan
7	Puskesmas Sukorejo
8	RSUD Mardi Waluyo
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
13	Dinas Lingkungan Hidup
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Dinas Penanaman Modal
18	Dinas Pendidikan
19	UPT SMPN 1
20	UPT SMPN 2
21	UPT SMPN 3
22	UPT SMPN 4
23	UPT SMPN 5
24	UPT SMPN 6
25	UPT SMPN 7
26	UPT SMPN 8
27	UPT SMPN 9
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Dinas Perhubungan
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
32	Dinas Sosial
33	Inspektorat Daerah
34	Kecamatan Kepanjenkidul
35	Kecamatan Sukoarjo
36	Kecamatan Sananwetan

No.	SKPD
37	Kelurahan Bendo
38	Kelurahan Bendogerit
39	Kelurahan Blitar
40	Kelurahan Gedog
41	Kelurahan Karang Sari
42	Kelurahan Karangtengah
43	Kelurahan Kauman
44	Kelurahan Kepanjenkidul
45	Kelurahan Kepanjenlor
46	Kelurahan Klampok
47	Kelurahan Ngadirejo
48	Kelurahan Pakunden
49	Kelurahan Plosokerep
50	Kelurahan Rembang
51	Kelurahan Sananwetan
52	Kelurahan Sentul
53	Kelurahan Sukorejo
54	Kelurahan Tanggung
55	Kelurahan Tanjungsari
56	Kelurahan Tlumpu
57	Kelurahan Turi
58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
60	Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
61	Bappeda
62	Bagian Hukum
63	Bagian Layanan dan Pengadaan Jasa
64	Bagian Organisasi
65	Bagian Pemerintahan
66	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan
67	Bagian Umum
68	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lampiran 3. Tabulasi Data Responden Penelitian

Good Government Governance (X1)											
Resp.	GGG1	GGG2	GGG3	GGG4	GGG5	GGG6	GGG7	GGG8	GGG9	GGG10	Total
1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	29
2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	30
5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
6	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	30
7	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
9	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
10	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	31
11	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	30
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
13	4	4	4	3	2	3	3	4	3	3	33
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	37
16	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	34
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
18	3	4	4	4	4	3	2	4	3	3	34
19	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	36
22	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	36
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
24	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	34
25	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	33
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
28	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	38
33	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	37
34	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
35	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
36	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
39	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	37
40	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	36
41	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
42	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	36
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
44	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	33
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
46	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	32
47	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	36
48	3	3	3	3	2	3	2	3	4	4	30
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
52	4	4	4	4	2	4	4	3	4	3	36
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

Good Government Governance (X1)											
Resp.	GGG1	GGG2	GGG3	GGG4	GGG5	GGG6	GGG7	GGG8	GGG9	GGG10	Total
54	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	32
55	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
56	2	4	2	2	4	2	2	3	2	2	25
57	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	38
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
59	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
60	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	30
61	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
62	3	4	4	4	3	4	4	4	2	2	34
63	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
65	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
66	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	30
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
68	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	33
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
70	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
71	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
73	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	30
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
76	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	31
77	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	28
78	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
80	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	30
81	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	28
82	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	37
83	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
86	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	28
87	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	37
88	3	4	3	4	2	3	3	3	3	4	32
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
90	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
92	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	28
93	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	37
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
96	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	31
97	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	31
98	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	37
99	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	36
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
102	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	35
103	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	26
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

Sistem Pengendalian Internal (X2)															
Resp.	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7	SPI8	SPI9	SPI10	SPI11	SPI12	SPI13	SPI14	Total
1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	44
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	43
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	43
4	3	3	3	3	3	2	2	3	4	2	3	2	3	3	39
5	2	2	3	2	3	4	2	4	3	4	3	3	4	4	43
6	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	41
7	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	55
8	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43
9	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	45
10	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	2	3	50
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
13	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	44
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
15	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	51
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
18	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	46
19	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
21	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	51
22	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	48
23	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	54
24	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	53
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
26	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	53
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
30	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	36
31	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	34
32	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	36
33	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	35
34	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	34
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
36	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	52
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
43	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	54
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	43
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
46	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	45
47	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	45
48	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	43
49	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	40
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
51	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
52	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	45
53	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	53
54	3	4	3	3	3	3	1	3	4	3	3	4	3	4	44

Sistem Pengendalian Internal (X2)															
Resp.	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7	SPI8	SPI9	SPI10	SPI11	SPI12	SPI13	SPI14	Total
55	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	51
56	2	1	3	4	1	2	3	3	2	2	4	4	2	3	36
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
58	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	53
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
60	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	39
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
62	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	51
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
65	4	4	3	3	3	3	1	4	4	4	4	4	3	3	47
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	41
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
68	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	44
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
70	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
71	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
73	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
74	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
76	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	44
77	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
78	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	47
79	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	45
80	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
81	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
82	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2	3	3	3	41
83	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	50
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
86	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	43
88	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	50
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
92	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
93	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	43
97	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	40
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
99	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	54
100	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	52
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
102	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	48
103	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
104	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)																					
Resp.	PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15	PSAP16	PSAP17	PSAP18	PSAP19	PSAP20	Total
1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	75
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	61
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	61
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	79
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
7	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	76
8	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	59
9	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	60
10	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	4	74
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	63
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	61
13	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	74
14	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59
15	4	4	4	3	4	3	3	3	2	4	4	4	3	3	2	2	2	3	4	4	65
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
17	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
18	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	75
19	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
20	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	77
21	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	68
22	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	62
23	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	71
24	3	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	72
25	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
26	4	4	4	3	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	72
27	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
28	4	4	2	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	76
29	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	49
30	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	64
31	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	51
32	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)																					
Resp.	PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15	PSAP16	PSAP17	PSAP18	PSAP19	PSAP20	Total
34	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	50
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
36	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	74
37	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	50
38	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	50
39	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	71
40	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	70
41	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	72
42	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	71
43	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	71
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
46	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
47	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	73
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	59
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
51	4	4	4	2	4	2	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	68
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	79
53	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	69
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	58
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	75
56	2	3	1	3	2	2	2	4	2	3	4	1	2	2	3	2	3	4	3	2	50
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	4	4	72
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
62	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
65	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	69
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)																					
Resp.	PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15	PSAP16	PSAP17	PSAP18	PSAP19	PSAP20	Total
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	78
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	74
71	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	62
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	75
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
78	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
82	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	70
83	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	67
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	76
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	79
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	61
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	63
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	79
99	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	74

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)																					
Resp.	PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15	PSAP16	PSAP17	PSAP18	PSAP19	PSAP20	Total
100	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	75
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	79
102	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	65
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
104	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	76
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80

UNIVERSITAS
MA CHUNG

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)										
Resp.	SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	SDM7	SDM8	SDM9	Total
1	3	3	3	3	3	4	3	3	3	25
2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	25
3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	25
4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	26
5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	31
6	3	3	2	3	4	3	3	3	3	24
7	4	4	4	4	2	4	4	4	4	30
8	3	3	3	4	3	3	3	3	3	25
9	3	3	3	4	3	3	3	3	3	25
10	4	4	4	2	3	4	4	4	4	29
11	3	3	3	2	3	3	4	3	3	24
12	3	3	2	3	3	3	3	3	3	23
13	4	4	2	4	4	4	4	4	4	30
14	3	3	4	3	3	3	3	3	3	25
15	3	4	3	3	3	3	3	3	4	25
16	3	4	3	3	3	3	3	3	3	25
17	3	4	3	3	3	3	3	3	3	25
18	4	2	4	4	4	4	4	4	4	30
19	4	3	3	3	3	3	3	3	3	25
20	3	3	3	3	3	3	4	4	4	26
21	3	3	3	3	3	3	4	4	4	26
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
23	3	3	3	3	3	3	4	4	4	26
24	3	4	3	3	3	4	3	4	4	27
25	2	3	3	3	3	3	3	3	3	23
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	3	3	3	3	3	3	3	3	4	24
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	3	4	3	3	3	3	4	4	4	27
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
36	3	3	3	3	3	3	3	4	3	25
37	4	4	4	3	3	3	4	3	4	28
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
43	3	2	2	2	2	3	3	3	2	20
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
45	2	2	2	3	3	2	2	2	3	18
46	3	4	3	4	3	3	4	3	3	27
47	3	4	3	3	3	3	4	4	4	27
48	3	3	3	2	3	3	3	4	4	24
49	3	2	3	3	3	3	3	3	3	23
50	3	3	3	3	3	3	4	4	4	26
51	3	3	3	2	2	2	3	3	3	21
52	3	3	3	3	3	3	4	4	4	26
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
55	4	3	4	4	3	4	4	4	4	30
56	3	1	2	2	2	3	3	2	1	18

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)										
Resp.	SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	SDM7	SDM8	SDM9	Total
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
58	3	3	3	3	3	3	3	4	4	25
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
61	3	3	3	3	3	4	3	3	4	25
62	3	3	3	3	3	3	3	4	4	25
63	3	3	3	3	3	3	4	3	3	25
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
65	1	3	2	2	2	2	4	4	4	20
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
68	3	3	3	3	3	3	4	4	4	26
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	4	4	4	4	3	3	4	4	4	30
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
72	3	3	3	3	3	3	3	4	4	25
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
74	3	3	3	3	3	3	4	3	4	25
75	3	3	3	2	2	2	3	2	4	20
76	3	3	3	4	4	4	4	4	4	29
77	3	3	3	4	4	4	3	4	3	28
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
80	3	3	4	3	3	3	3	3	3	25
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
82	2	3	3	3	3	3	3	3	3	23
83	3	3	3	3	3	3	4	3	3	25
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
93	3	3	3	3	3	3	4	3	3	25
94	3	4	4	3	4	4	4	4	4	30
95	2	2	2	2	2	2	2	4	3	18
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
97	3	3	3	3	3	3	2	3	3	23
98	4	4	3	3	3	3	4	4	4	28
99	4	4	3	4	3	4	4	4	4	30
100	3	3	3	3	3	3	4	4	3	26
101	3	4	3	4	4	4	4	4	4	30
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)												
Resp.	LKPD1	LKPD2	LKPD3	LKPD4	LKPD5	LKPD6	LKPD7	LKPD8	LKPD9	LKPD10	LKPD11	Total
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	34
2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)												
Resp.	LKPD1	LKPD2	LKPD3	LKPD4	LKPD5	LKPD6	LKPD7	LKPD8	LKPD9	LKPD10	LKPD11	Total
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	34
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	34
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	42
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	34
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	42
8	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34
9	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34
10	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	42
11	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	33
12	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
13	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	3	39
14	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34
15	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	37
16	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34
17	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34
18	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
19	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34
20	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	42
21	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	42
22	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	34
23	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	4	40
24	4	4	3	4	2	3	3	3	3	4	3	36
25	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34
26	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	42
27	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34
28	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	42
29	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
30	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	42
31	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	42
32	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
33	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
36	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	3	33
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
44	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	38
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
47	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	40
48	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	36
49	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
51	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	38
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
54	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
56	2	4	3	3	2	4	2	2	2	4	2	30
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
58	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	39

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)												
Resp.	LKPD1	LKPD2	LKPD3	LKPD4	LKPD5	LKPD6	LKPD7	LKPD8	LKPD9	LKPD10	LKPD11	Total
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
65	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
70	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
74	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	42
75	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	40
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
77	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	40
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
79	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
82	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	36
83	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	37
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
97	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	35
98	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
102	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	41
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
104	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	41
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44

Lampiran 4. Statistik Deskriptif

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Observed min</i>	<i>Observed max</i>	<i>Standard deviation</i>	<i>Number of observations used</i>
Intercept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
RSPI	3,36	3,21	2,43	4,00	0,47	105,00
RSDM	3,30	3,11	2,11	4,00	0,45	105,00
RGGG	3,48	3,60	2,50	4,00	0,45	105,00
RPSAP	3,45	3,55	2,45	4,00	0,46	105,00
RLKPD	3,51	3,64	2,73	4,00	0,43	105,00

Lampiran 5. Hasil Uji Convergent Validity

	<i>Outer loadings</i>
GGG1 <- GGG	0,767
GGG10 <- GGG	0,779
GGG2 <- GGG	0,769
GGG3 <- GGG	0,791
GGG4 <- GGG	0,780
GGG5 <- GGG	0,744
GGG6 <- GGG	0,778
GGG7 <- GGG	0,766
GGG8 <- GGG	0,804
GGG9 <- GGG	0,783
LKPD1 <- LKPD	0,811
LKPD10 <- LKPD	0,780
LKPD11 <- LKPD	0,793
LKPD2 <- LKPD	0,816
LKPD3 <- LKPD	0,810
LKPD4 <- LKPD	0,828
LKPD5 <- LKPD	0,817
LKPD6 <- LKPD	0,781
LKPD7 <- LKPD	0,775
LKPD8 <- LKPD	0,787
LKPD9 <- LKPD	0,798
PSAP1 <- PSAP	0,804
PSAP10 <- PSAP	0,807
PSAP11 <- PSAP	0,806
PSAP12 <- PSAP	0,769
PSAP13 <- PSAP	0,783

	<i>Outer loadings</i>
PSAP14 <- PSAP	0,784
PSAP15 <- PSAP	0,784
PSAP16 <- PSAP	0,784
PSAP17 <- PSAP	0,777
PSAP18 <- PSAP	0,794
PSAP19 <- PSAP	0,771
PSAP2 <- PSAP	0,832
PSAP20 <- PSAP	0,811
PSAP3 <- PSAP	0,791
PSAP4 <- PSAP	0,820
PSAP5 <- PSAP	0,824
PSAP6 <- PSAP	0,796
PSAP7 <- PSAP	0,769
PSAP8 <- PSAP	0,777
PSAP9 <- PSAP	0,793
SDM1 <- SDM	0,799
SDM2 <- SDM	0,803
SDM3 <- SDM	0,795
SDM4 <- SDM	0,784
SDM5 <- SDM	0,784
SDM6 <- SDM	0,786
SDM7 <- SDM	0,799
SDM8 <- SDM	0,799
SDM9 <- SDM	0,802
SPI1 <- SPI	0,784
SPI10 <- SPI	0,842
SPI11 <- SPI	0,795
SPI12 <- SPI	0,794
SPI13 <- SPI	0,800
SPI14 <- SPI	0,865
SPI2 <- SPI	0,784
SPI3 <- SPI	0,843
SPI4 <- SPI	0,834
SPI5 <- SPI	0,791
SPI6 <- SPI	0,794
SPI7 <- SPI	0,750
SPI8 <- SPI	0,816
SPI9 <- SPI	0,832

Lampiran 6. AVE

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho a)</i>	<i>Composite reliability (rho c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
GGG	0,927	0,930	0,938	0,603
LKPD	0,944	0,945	0,951	0,640
PSAP	0,969	0,971	0,972	0,631
SDM	0,928	0,939	0,939	0,631
SPI	0,960	0,963	0,964	0,655

Lampiran 7. Hasil Uji Reliabilitas Outer Model

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho a)</i>	<i>Composite reliability (rho c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
GGG	0,927	0,930	0,938	0,603
LKPD	0,944	0,945	0,951	0,640
PSAP	0,969	0,971	0,972	0,631
SDM	0,928	0,939	0,939	0,631
SPI	0,960	0,963	0,964	0,655

Lampiran 8. Hasil Uji Multikolinearitas

	VIF
TSPI	1,857
TGGG	1,970
TSDM	1,164
TPSAP	1,484

Lampiran 9. Hasil Uji R-Square

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
LKPD	0,629	0,614

Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis

	<i>Original sample</i>	<i>Sample mean</i>	<i>Standard deviation</i>	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>
GGG -> LKPD	0,258	0,254	0,116	2,229	0,013
PSAP -> LKPD	0,293	0,316	0,102	2,879	0,002
SDM -> LKPD	0,393	0,389	0,091	4,325	0,000
SPI -> LKPD	0,078	0,063	0,116	0,669	0,252